

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar belakang masalah

Sarana transportasi berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan, serta mendukung mobilitas manusia, mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional. Sarana transportasi perkeretaapian memiliki potensi dan peluang besar dalam sistem transportasi masal dan mengangkut muatan berat dalam jumlah lebih besar, sehingga diharapkan dapat diandalkan sebagai transportasi masal yang ekonomis dan aman. Dalam hal ini pemerintah memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada PT Kereta Api (Persero) untuk menyelenggarakan perkeretaapian di Indonesia.

PT Kereta Api (Persero), sesuai dengan Undang-Undang No.13 tahun 1992 Pasal 6, ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jasa angkutan dengan kereta api, penunjukan tersebut dimaksudkan agar PT Kereta Api (Persero) menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dalam bentuk layanan jasa kereta api untuk memperlancar arus perpindahan orang atau barang secara masal guna menunjang pembangunan nasional. Di sisi lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.57 tahun 1990, PT Kereta Api (Persero) dituntut untuk mampu memupuk atau menghasilkan keuntungan guna menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Kondisi tersebut telah mendorong manajemen PT Kereta Api (Persero) untuk

mampu mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimilikinya, meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan dan bekerja lebih efisien sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dunia usaha.

PT Kereta Api (Persero) merupakan Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain untuk memperoleh laba perusahaan. Perusahaan ini dari mulai berdiri sampai sekarang telah mengalami perkembangan baik dari segi operasi maupun manajemen perusahaan. Berbagai upaya dilakukan oleh manajemen PT Kereta Api (Persero) untuk menekan besarnya kerugian yang selama ini diderita perusahaan atau menghasilkan keuntungan dengan tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai badan usaha yang melayani kepentingan umum (*public service*). Salah satu upaya yang cukup dominan yang dilakukan manajemen PT. Kereta Api (Persero) adalah meningkatkan pendapatan yang menjadi sumber utama pembiayaan perusahaan terutama pendapatan angkutan kereta api yang berasal dari angkutan penumpang.

Pendapatan yang diperoleh harus dipertanggungjawabkan, terutama seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pendapatan mulai dari perolehan sampai dengan pendayagunaannya harus dikelola dengan baik oleh perusahaan. Untuk itu perusahaan memerlukan pengendalian pendapatan guna menjamin adanya pengelolaan pendapatan perusahaan secara efektif dan efisien.

Faktor penting yang harus diperhatikan adalah perlu adanya bimbingan dan pengarahan oleh manajemen kepada para pelaksana agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah yang ditetapkan. Pengendalian pendapatan

dapat dicapai melalui organisasi fungsional, pelimpahan tanggung jawab dan wewenang, serta bukti-bukti dokumentasi yang diperoleh pada berbagai tahapan operasi. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa pengendalian pendapatan di perusahaan demikian pentingnya sehingga harus dipantau, apakah pengendalian manajemen yang diterapkan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Salah satu alat yang digunakan manajemen untuk memantau kegiatan operasi perusahaan seperti pengendalian pendapatan tersebut adalah pemeriksaan operasional. Pemeriksaan operasional adalah salah satu cara yang dikembangkan manajemen untuk mengantisipasi dan menanggulangi risiko serta mendeteksi berbagai masalah yang merugikan dalam usaha mencapai tujuan. Pemeriksaan operasional dapat menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas atau program dari objek yang diperiksa dengan memberikan saran-saran tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih hemat, lebih efisien dan lebih efektif. Hal tersebut dilakukan dengan menilai ketaatan pada ketentuan yang berlaku, efisiensi, kehematan, dan efektivitas objek yang diperiksa tersebut dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan aktivitas atau program.

PT Kereta Api (Persero) dalam hal ini telah menjadi tugas dan fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Kereta Api, seperti yang dijelaskan dalam surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.8 1991 pasal 30 huruf (a) bahwa satuan pengawasan intern mempunyai fungsi melaksanakan pengawasan dan memberikan penilaian atas pelaksanaan manajemen keuangan, manajemen perusahaan dan manajemen umum di lingkungan PT Kereta Api (Persero)..

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk meneliti pemeriksaan operasional yang dilaksanakan oleh SPI PT Kereta Api (Persero) atas pengendalian pendapatan yang berasal dari angkutan penumpang dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul:

“Hubungan Antara Pelaksanaan Pemeriksaan Operasional Dengan Sistem Pengendalian Pendapatan Angkutan Penumpang pada PT Kereta Api (Persero)”

1.2 Identifikasi masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian, bahwa pengendalian pendapatan mempunyai peranan yang penting dalam mengarahkan manajemen untuk mencapai tujuan, sehingga manajemen perlu melakukan pemeriksaan operasional, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan operasional yang dilaksanakan oleh SPI PT Kereta Api (Persero)?
2. Bagaimanakah sistem pengendalian pendapatan angkutan penumpang yang dilaksanakan oleh manajemen PT Kereta Api (Persero)?
3. Apakah terdapat hubungan antara pelaksanaan pemeriksaan operasional dengan sistem pengendalian pendapatan angkutan penumpang?

1.3 Maksud dan tujuan penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan maksud untuk memperoleh data

informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi, sehingga dapat dilakukan pembahasan dan analisis guna mendapatkan jawaban dari permasalahan yang telah penulis tuangkan dalam identifikasi masalah.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan operasional yang dilaksanakan oleh SPI PT Kereta Api (Persero) atas sistem pengendalian pendapatan angkutan penumpang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengendalian pendapatan angkutan penumpang yang dilaksanakan oleh manajemen PT Kereta Api (Persero).
3. Untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan pemeriksaan operasional dengan sistem pengendalian pendapatan angkutan penumpang.

1.4 Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya di bawah ini :

1. Bagi penulis, hasil penelitian dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai ada tidaknya kesesuaian antara fakta dengan dasar teori yang telah dipelajari.

2. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan operasional atas pengendalian pendapatan angkutan penumpang.
3. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai data dasar untuk kegiatan penelitian khususnya dalam bidang yang sama dan digunakan sebagai referensi tambahan serta dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian di bidang lainnya.

1.5 Rerangka pemikiran dan hipotesis

Organisasi perusahaan, apapun bentuk dan orientasinya, pendapatan merupakan faktor yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan yang bersangkutan, demikian halnya dengan PT. Kereta Api (Persero) yang pelaksanaan operasinya juga bergantung pada pendapatan yang diperolehnya, terutama pendapatan PT Kereta Api (Persero) yang berasal dari aktivitas pengoperasian kereta api angkutan penumpang.

Ikatan Akuntan Indonesia di dalam Standar Akuntansi Keuangan memberikan pengertian pendapatan sebagai berikut:

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang berasal dari kontribusi normal.”

(IAI, 1994: 23.3)

Pendapatan yang diperoleh harus dipertanggungjawabkan, seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pendapatan mulai dari perolehan hingga pendayagunaannya harus dikelola dengan baik oleh perusahaan, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan, penyelewengan dan pemborosan

yang dapat merugikan perusahaan. Untuk itu perusahaan memerlukan sistem pengendalian guna menjamin adanya pengelolaan pendapatan perusahaan secara efektif dan efisien.

Supriyono (2000:278) mengungkapkan pengertian sistem pengendalian dalam buku Sistem Pengendalian Manajemen sebagai berikut:

“Sistem pengendalian adalah seperangkat sistem formal dan sistem informal yang di desain untuk membantu manajemen dalam mengarahkan organisasi untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai tujuannya dengan menyatukan berbagai usaha yang dilakukan oleh berbagai sub unit atau individu dalam organisasi.”

Berdasarkan kutipan di atas terlihat bahwa suatu sistem pengendalian berusaha untuk mengarahkan berbagai macam usaha yang dilaksanakan oleh semua sub unit organisasi agar mengarah kepada tujuan organisasi dan tujuan para manajernya. Sistem pengendalian membantu memberikan arah kegiatan manajemen sesuai dengan garis pedoman yang sudah ditentukan dalam proses perencanaan strategi.

Salah satu upaya untuk menciptakan dan melaksanakan sistem pengendalian, faktor penting yang harus diperhatikan adalah perlu adanya bimbingan dan pengarahan oleh manajemen kepada para pelaksana agar dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Pengendalian pendapatan dapat dicapai melalui organisasi fungsional, pelimpahan tanggung jawab dan wewenang, serta bukti-bukti dokumentasi yang diperoleh pada berbagai tahapan operasi. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa sistem pengendalian pendapatan di perusahaan demikian pentingnya sehingga harus

dipantau, apakah pengendalian pendapatan yang diterapkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian pendapatan yang diterapkan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien maka diperlukan pemeriksaan operasional. Pemeriksaan operasional tersebut pada dasarnya merupakan pengembangan dari pemeriksaan sebelumnya (pemeriksaan keuangan), yang dimaksudkan untuk menilai suatu kegiatan, baik prestasi maupun kinerjanya, mengidentifikasi berbagai kelemahan pengendalian untuk perbaikan, dan memberikan rekomendasi (saran-saran) untuk perbaikan atau tindak lanjut.

Salah satu pengertian pemeriksaan operasional diungkapkan oleh Widjayanto (1985:16) dalam buku *Pemeriksaan Operasional Perusahaan* sebagai berikut:

“ Pemeriksaan operasional adalah suatu tinjauan dan penilaian efisiensi serta aktivitas suatu kegiatan atau prosedur-prosedur kegiatan. Pemeriksaan ini disertai dengan tanggung jawab untuk mengungkapkan dan memberi informasi kepada manajemen mengenai berbagai masalah operasi, meskipun tujuan utamanya adalah membantu manajemen untuk memecahkan berbagai masalah dengan merekomendasikan berbagai tindakan yang diperlukan”

Berdasarkan pengertian diatas dapat dilihat bahwa pemeriksaan operasional adalah suatu tinjauan penilaian atas kegiatan suatu organisasi untuk mengungkapkan dan memberi informasi kepada manajemen mengenai berbagai masalah operasi, yang bertujuan untuk membantu pimpinan organisasi dalam melaksanakan tugas dengan lebih baik, penilaian ditekankan pada efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan barang, jasa, tenaga dan sebagainya.

Tujuan pemeriksaan operasional menurut Abadi Jusuf (1999:764) dalam bukunya Auditing Pendekatan Terpadu sebagai berikut:

“Pemeriksaan operasional bertujuan untuk menentukan efektifitas atau efisiensi dari tiap bagian suatu organisasi”

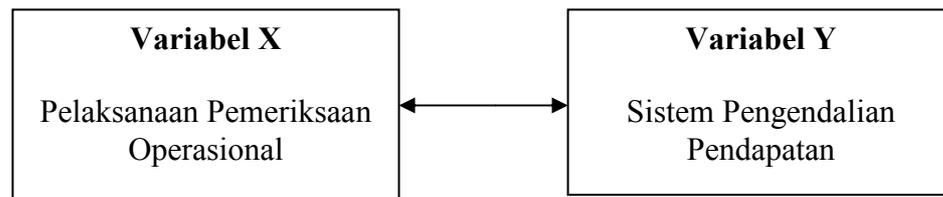
Sedangkan diungkapkan Mulyadi dan Puradiredja (1998:30), secara lebih rinci tujuan pemeriksaan operasional sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi kinerja
- b. Mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan
- c. Membuat rekomendasi atau tindakan lebih lanjut.

Pemeriksaan operasional tercapai dengan menilai ketaatan pada ketentuan yang berlaku, efisiensi, kehematan dan efektivitas objek yang diperiksa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan aktivitas/program. Dengan tujuan pemeriksaan operasional ini, pemeriksaan dimaksudkan untuk memastikan apakah pengendalian yang ada memadai.

Berdasarkan uraian di atas tujuan pemeriksaan operasional adalah untuk memastikan apakah pengendalian yang ada memadai dan efektif, sehingga dengan melaksanakan pemeriksaan operasional atas sistem pengendalian pendapatan akan membantu pihak manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu penulis mengajukan hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya dalam penelitian sebagai berikut:

“Pelaksanaan pemeriksaan operasional berhubungan dengan sistem pengendalian pendapatan angkutan penumpang”



1.6 Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengadakan survey langsung ke perusahaan yang menjadi objek penelitian, dimana metode yang digunakan adalah :

1. Wawancara dengan bagian-bagian yang terkait dalam perusahaan.
2. Observasi langsung terhadap objek penelitian.
3. Penyebaran daftar pertanyaan terstruktur (kuesioner).

Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur-literatur yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti, yang berfungsi sebagai landasan teoritis guna mendukung data-data primer yang di peroleh selama penelitian. Data yang telah dikumpulkan akan diolah, dianalisa dan diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari sehingga dapat di gunakan untuk melakukan pengujian atas hipotesis yang diajukan

Dalam melakukan pengujian hipotesis yang telah diajukan sebelum, penulis menggunakan metode "*Korelasi Pearson*". Menurut Singgih Santoso

(2004:315) metode korelasi *Pearson* ini mengukur keeratan hubungan di antara hasil-hasil pengamatan dari populasi yang mempunyai dua varian (bivariat). Korelasi *Pearson* banyak digunakan untuk mengukur korelasi data interval atau rasio.

1.7 Lokasi dan waktu penelitian

Dalam penelitian lapangan ini, penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data di Kantor Pusat PT. Kereta Api (Persero), yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung. Adapun waktu penelitian yang penulis laksanakan adalah 27 September 2006 sampai dengan 20 Oktober 2006.